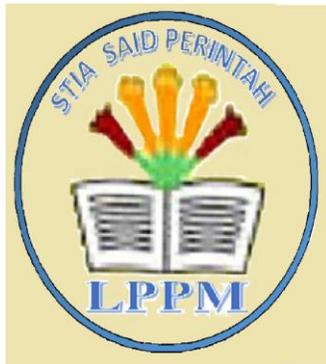


**Public Policy:
Jurnal Aplikasi
Kebijakan Publik dan Bisnis**

**Reinventing Government
Pelayanan Mobil Siaga Desa**

**Diyah Norisa Retno ¹⁾
Muhammad Miftahul Huda ²⁾
Junadi ³⁾**

**^{1,2,3}Universitas Bojonegoro,
Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia
diyahr5@gmail.com**



LPPM STIA Said Perintah

Volume 5, No. 1, Maret 2024

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Received; 2023 - 12 - 26

Accepted; 2024 - 01 - 06

Published; 2024 - 01 - 11



The editorial board holds publication rights for articles under a CC BY SA license, allowing distribution without separate permission if credited. Published articles are openly accessible for research, with no liability for other copyright violations (<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/kebijakanhakcipta>).



[Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstract

The state must provide high-quality public services to its citizens. Regular innovation in service delivery is important to ensure satisfaction among the recipients. The concept of reinventing government, which is a principle of New Public Management (NPM), is used as a reference for the bureaucracy to provide modern and reliable public services. Health services are crucial, especially in terms of transportation. Standby cars are an innovative example of transportation services provided by the government to facilitate public facilities and infrastructure. This study was conducted to examine the use of reinventing government principles in village standby car services. The research used descriptive methods, including observation, interviews, and documentation. The Social Service and the person in charge of managing the village alert car provided the data source. The findings revealed that there are still indicators not being met if the standby car service system refers to the principle of reinventing government, specifically the competitive government indicators. In conclusion, village standby car services have a significant impact on the community, especially those living in remote areas.

Keywords; *Public Service, Reinventing Government, Standby Car*

Pendahuluan

Konsep *reinventing government* dalam *New Public Management* (NPM) menjadi upaya pemerintah dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik dengan metode baru untuk mewujudkan kepuasan bagi masyarakat dan merubah metode kinerja yang pada awalnya berorientasi pelayanan kepada birokrat menjadi berorientasi kepada masyarakat (Madjid, 2017). Kepuasan publik sendiri menjadi isu yang krusial dalam sistem birokrasi pemerintahan, dikarenakan banyaknya kinerja aparatur yang tidak rasional. *Reinventing government* (mewirausahakan birokrasi) yaitu mentransfer berbagai sumber perekonomian dari suatu wilayah yang produktivitasnya rendah ke wilayah yang produktivitasnya lebih tinggi dan hasilnya lebih besar (Amiruddin, 2016). Permasalahan yang muncul ketika memahami konsep mewirausahakan birokrasi yaitu beranggapan bahwa mewirausahakan birokrasi menuntut pemerintah untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, namun yang dimaksudkan yaitu agar pemerintah dapat meningkatkan sistem kerjanya menjadi lebih inovatif, akuntabel, efektif dan efisien (Kemdagri, 2018).

Pada awalnya, *reinventing government* dikembangkan oleh Osborne dan Gaebler di Amerika Serikat karena pada saat itu terdapat permasalahan dalam birokrasi pemerintahan dan *reinventing government* diterapkan untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada birokrasi dan pemikiran tersebut menjadi populer di era 80-an hingga awal 90-an (DIY, 2015). Pada tahun 2012, pemerintahan Selandia Baru meluncurkan program pemerintahan yaitu "*Agenda of Better Public Services*" yang didasarkan pada prinsip *reinventing government* dengan tujuan mencapai hasil yang baik untuk masyarakat dengan pengurangan birokrasi, menerapkan birokrasi yang berorientasi masyarakat dan peningkatan kolaborasi antar aktor yang terlibat (Mustanir, 1994). Dalam konsep *reinventing government* oleh Osborne dan Gaebler dalam bukunya yang berjudul "*Reinventing government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*" memaparkan bahwa ada 10 indikator *reinventing government* yaitu; pemerintahan katalis, pemerintahan milik masyarakat, pemerintahan kompetitif, pemerintahan yang digerakkan oleh misi, pemerintahan berorientasi hasil, pemerintahan berorientasi masyarakat, pemerintahan wirausaha, pemerintahan antisipatif, pemerintahan desentralisasi, pemerintahan berorientasi pasar (Ramadhani, Mita et al., 2022). Dalam perkembangan era

globalisasi ini, pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan sebaik-baiknya untuk masyarakat dengan menghadirkan inovasi beserta suasana baru.

Kesehatan menjadi salah satu contoh pelayanan yang harus ditingkatkan oleh pemerintah karena berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Pemberian pelayanan kesehatan yang layak dan memadai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 1 ayat 3 yaitu;

"Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitative dan/atau paliatif" (https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/258028/Uu-No-17-Tahun-2023, n.d.).

Transportasi kesehatan masih menjadi permasalahan bagi masyarakat pelosok yang jauh dari ranah kota khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Keterbatasan ini mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi yang baik dalam melayani masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Kabupaten Bojonegoro sendiri memiliki beberapa wilayah kecamatan yang lingkupnya jauh dari perkotaan dan jalan raya. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut akan merasakan kesulitan untuk mendapatkan sarana transportasi dan sarana kesehatan yang layak dan melatarbelakangi pengadaan mobil siaga desa sebagai sarana transportasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Mobil siaga merupakan sarana transportasi kesehatan yang melayani transportasi secara gratis selama 24 jam kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan pertolongan kesehatan dan kegawat darurat.

Tujuan utama diberikannya mobil siaga kepada desa yaitu untuk membantu masyarakat dalam memperoleh transportasi ketika ada kondisi gawat darurat (<https://bojonegorokab.go.id>. n.d.). Dengan adanya mobil siaga, memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan transportasi kesehatan. Mobil siaga desa yang menjadi sarana transportasi layanan kesehatan, pada beberapa kasus yang mana masyarakat di desa tersebut tidak terlalu memanfaatkan layanan mobil siaga dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat akan manfaat dan kegunaan mobil siaga desa. Kurangnya promosi dan sosialisasi dapat menyebabkan masyarakat enggan menggunakan fasilitas tersebut dikarenakan merasa asing dan tidak

terbiasa dan mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk meminjam mobil tetangganya yang terkesan sudah terbiasa ataupun menggunakan fasilitas mobil lain seperti *ambulance* desa dan layanan mobil kesehatan milik swasta. Selain itu, terbatasnya waktu supir juga menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menggunakan mobil siaga.

Hasil penelitian Wiseno et al., (2023) menunjukkan adanya beberapa temuan permasalahan mengenai pengadaan mobil siaga desa yakni masyarakat merasa kurang koordinasi mengenai penggunaan, kurang faham tentang pemanfaatan, beranggapan bahwa mobil siaga merupakan mobil dinas untuk perangkat desa, dan kurang responsif ketika masyarakat memerlukan bantuan. Penelitian empiris lainnya oleh Amalia et al., (2018) di Desa Latsari, Kabupaten Jombang yang mengungkapkan fakta bahwa masyarakat desa Latsari belum sepenuhnya mengetahui bagaimana cara penanganan pertama pada kegawat-daruratan dengan menggunakan fasilitas mobil siaga desa. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pengadaan suatu inovasi dalam peningkatan pelayanan dibutuhkan koordinasi kepada masyarakat terkait penggunaan dan manfaat layanan yang diberikan.

Model kajian empiris yang disebutkan diatas memiliki perbedaan dengan kajian ini khususnya pada teori yang digunakan. Kajian-kajian empiris diatas menggunakan teori efektivitas untuk menjadi acuan penelitian sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori prinsip *reinventing government* dalam pemberian layanan mobil siaga desa. Perbedaan tersebut merupakan kebaharuan kajian ini dengan fokus utama adalah pada pelaksanaan pelayanan dengan prinsip *reinventing government* dalam pelayanan mobil siaga desa yang bertujuan untuk mengetahui sudahkah pemerintah di Kabupaten Bojonegoro menggunakan prinsip *reinventing government* dalam pemberian layanan kepada masyarakat khususnya dalam layanan transportasi mobil siaga.

Kerangka Teoritis

Konsep *Reinventing Government*

Reinventing government atau pemerintahan wirausaha merupakan suatu usaha pemerintah dijalankan secara maksimal untuk menghasilkan dan mengembangkan inovasi dan kreativitas dengan tujuan agar lebih dekat dengan pelanggan (masyarakat) melalui gagasan dan ide-ide baru demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Apriyanto et al.,

2023). Pentingnya melakukan inovasi dalam pelayanan yaitu agar pelayanan yang diberikan lebih berkualitas dan terjamin. Kebutuhan inovasi pelayanan berjalan sesuai perkembangan zaman yang semakin modern, adanya kemajuan teknologi menjadikan masyarakat bergantung dan mengharapkan adanya pelayanan yang semakin modern dan tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, inovasi sistem pelayanan ditingkatkan dengan salah satu caranya yaitu bekerja sama langsung dengan pihak swasta demi bisa mengolah aset menjadi lebih berguna dan berdaya saing di era modern ini. Namun beberapa permasalahan yang muncul ketika menafsirkan konsep *reinventing government* yakni sering kali dianggap bahwa konsep *reinventing government* berarti instansi pemerintah dituntut untuk berwirausaha dan menghasilkan tambahan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal yang dimaksud adalah memberdayakan instansional dengan mentransformasikan semangat wirausaha kepada birokrasi (Kemdagri, 2018).

Menurut Osborne dan Gaebler, *reinventing government* berarti mengkonversi jiwa-jiwa wirausaha seorang birokrasi ke dalam sektor publik (Djumiarti, 2010). Oleh karena itu, seorang birokrat harus menguasai dan memahami konsep dan tata cara pelaksanaan konsep *reinventing government* didalam suatu instansional. Tujuan pelaksanaan *reinventing government* adalah untuk mengembangkan sikap dan perilaku seorang birokrat menjadi lebih inovatif, adaptif dan terkontrol sehingga dapat memenuhi kebutuhan birokrasi (Fatikha, 2016). *Reinventing government* adalah mengkonversikan, menumbuhkan dan memperluas pemikiran mengenai efektivitas, efisiensi dan kapabilitas aparatur negara dalam menciptakan inovasi dan gagasan baru (Ramadhani, Mita et al., 2022). Menurut Osborne, transformasi ini dapat dicapai dengan merubah sistem organisasi, struktur budaya dan kekayaan serta transparansi dan juga pertanggung jawaban dari para birokrasi kepada masyarakat.

Reinventing government dinilai penting bagi birokrasi karena dapat mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam organisasi pemerintah dan dapat merubah *mindset* para aktor dalam birokrasi untuk memberikan inovasi dan pelayanan yang berkualitas. Selain pada birokrasi, pentingnya penerapan *reinventing government* juga berpengaruh terhadap masyarakat sebagai penerima layanan, karena ketika pemerintah meningkatkan sistem kinerjanya menjadi lebih berkualitas, masyarakat pun akan merasakan kepuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan. *Reinventing government* dapat

dijalankan sesuai harapan jika semua aktor yang terlibat menjalankan tugasnya dengan baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat disamping kepentingan pribadinya ataupun kepentingan tertentu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mendeskripsikan uraian sistematis tentang *reinventing government* pelayanan mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro. Sumber data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Desa Ngadiluhur. Adapun sumber data sekunder yang diperoleh melalui website dan juga beberapa jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang pada akhirnya menghasilkan *key informan* yaitu Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro selaku *leading sector* pengadaan bantuan mobil siaga desa di Bojonegoro dan Sekretaris Desa Ngadiluhur yang berperan sebagai ketua penanggung jawab mobil siaga desa.

Setelah data dikumpulkan, untuk selanjutnya dilakukan analisis data guna mendapatkan hasil penelitian yang di dapatkan dari data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, mengadopsi teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sari Sasi Gendro, (2022) yang terbagi menjadi tiga alur analisis data. Pertama adalah reduksi data, yaitu penyederhanaan, atau pemilihan data dan diambil yang terpenting. Kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian teks yang mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh dan ketiga adalah penarikan kesimpulan setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data.

Hasil dan Pembahasan

Menurut data yang diperoleh sudah ada 386 desa dari jumlah keseluruhan 419 desa di Kabupaten Bojonegoro yang sudah menerima bantuan mobil siaga desa. Desa yang tidak mendapat bantuan disebabkan karena belum memenuhi syarat secara regulasi dan dimungkinkan akan mendapatkan di tahun berikutnya apabila semua syarat sudah terpenuhi.

Bantuan Mobil Siaga

No.	Indikator	Jumlah Desa
1.	Sudah mendapat	386
2.	Belum mendapat	33
Total		419

Sumber; Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, (2023)

Pelaksanaan *reinventing government* harus relevan dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat yakni kondisi sosial, ekonomi, budaya dan juga kondisi politik. Artinya bahwa saat pemerintah mengimplementasikan konsep *reinventing government* dalam pelayanannya, maka memungkinkan pelayanan yang diberikan akan semakin terjamin dan optimal sesuai dengan harapan masyarakat agar memperoleh pelayanan publik yang lebih maju dan modern sesuai perkembangan zaman.

Untuk mewujudkan prinsip *reinventing government* diperlukan adanya kolaborasi antara birokrasi dan masyarakat, pemerintah sebagai instansi yang menyediakan layanan kebutuhan dan masyarakat sebagai pendukung dan penerima layanan. Untuk itu, kedua belah pihak harus saling berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro. Sebelum menerapkan konsep ini, ada baiknya pemerintah sebagai aparat birokrasi yang memberikan layanan kepada masyarakat harus menguasai teori-teori yang ada dalam *reinventing government* untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

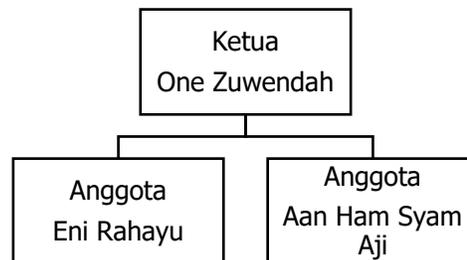
1. Pemerintahan Katalis

Pemerintahan katalis dalam konsep *reinventing government* adalah tugas birokrasi hanya sebagai pengarah (Murtir Jeddawi, 2008). Artinya bahwa pemerintah hanya memberikan arahan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kasus mobil siaga yang berdasarkan Perda dan Perbup Bojonegoro, pemerintah menghadirkan sebuah layanan transportasi sosial untuk masyarakat sesuai dengan ajuan yang sebelumnya pernah diusulkan oleh masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan prinsip pemerintahan katalis yaitu dengan memberikan arahan dan bantuan mobil siaga kepada desa yang bertujuan untuk pelayanan sosial seperti layanan kesehatan, layanan bencana dan kegawat-daruratan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan arahan yang diberikan, pemerintah melalui Dinas Sosial menyerahkan bantuan mobil siaga kepada desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang kemudian Pemdes membentuk kelompok yang bertugas sebagai penanggung jawab pengelolaan mobil siaga, dan mencari supir yang memungkinkan sudah berpengalaman dan bisa setia dalam melayani mobil siaga kapanpun ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Contoh salah satu desa yang mendapatkan mobil siaga yaitu Desa Ngadiluhur yang berada di Kecamatan Balen. Realita pada desa tersebut adalah pemerintah desa membentuk kelompok yang bertanggung jawab mengelola dan merawat mobil siaga yang terdiri dari ketua dan anggota pengurus. Ketua Pengurus mobil siaga Desa Ngadiluhur (One Zuwendah) mengatakan bahwa;

“Penentuan driver untuk mobil siaga ditentukan melalui musyawarah desa yang diadakan di balai desa Ngadiluhur dengan menunjuk orang yang berpengalaman dalam hal mengendarakan mobil dan yang selalu stay jika ada yang membutuhkan bantuan dengan mobil siaga” (Hasil wawancara 19 Desember 2023).

Bagan Penanggung Jawab Mobil Siaga Desa Ngadiluhur



Sumber; Pemdes Ngadiluhur, (2023)

2. Pemerintahan Milik Masyarakat

Pemerintah milik masyarakat artinya seluruh masyarakat diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk memperoleh layanan kesehatan secara mandiri dan pemerintah hanya berperan sebagai pengarah. Perspektif pemerintahan milik rakyat dalam konsep *reinventing government* sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 4 ayat (1) bahwa; “Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab”. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus mandiri melayani kebutuhannya masing-masing terutama

kebutuhan tentang kesehatan. Dalam hal ini pemerintah harus terus berupaya untuk bersosialisasi terkait manfaat penggunaan mobil siaga agar tepat guna dan tidak menyalahgunakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pemanfaatan mobil siaga desa.

Dalam prinsip pemerintahan milik rakyat pada *reinventing government* pelayanan mobil siaga desa, dimaksudkan masyarakat bisa memanfaatkan dan menggunakan fasilitas mobil siaga secara mandiri dan bebas yang tentunya sesuai aturan dan kebutuhan tanpa menunggu arahan lagi dari pemerintah. Karena tujuan utama dari mobil siaga yaitu untuk membantu dan memenuhi kebutuhan akan pelayanan bagi masyarakat.

3. Pemerintahan Kompetitif

Pemerintahan yang kompetitif bermaksud melakukan persaingan para birokrat dengan tujuan melahirkan inovasi dan kreativitas baru dalam memberikan layanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghadirkan mobil siaga sebagai inovasi pemberian layanan kepada masyarakat khususnya dalam hal layanan kesehatan yang pada saat ini sangat dibutuhkan masyarakat terutama bagi yang berdomisili jauh dari perkotaan atau rumah sakit. Peningkatan inovasi terkait kebutuhan kesehatan masyarakat di Bojonegoro saat ini sudah berjalan cukup baik dibandingkan dengan sebelum diberikannya bantuan mobil siaga, hal ini dibuktikan dengan penilaian masyarakat mengenai manfaat penggunaan mobil siaga.

Selain itu, peningkatan inovasi di Kabupaten Bojonegoro dalam pemberian layanan kepada masyarakat terkhusus dalam pelayanan kesehatan juga sudah menggunakan teknologi informasi sebagai bentuk perkembangan zaman untuk menuju Bojonegoro yang lebih modern. Misalnya pada pelayanan gawat darurat kesehatan sudah diberikan aplikasi khusus untuk bagi masyarakat jika membutuhkan layanan kesehatan. Namun sayangnya, pada layanan mobil siaga belum terdapat inovasi teknologi yang bisa digunakan oleh masyarakat karena pada saat ini hanya mengandalkan nomor pengelola untuk dihubungi.

Saat ini, tidak hanya mobil siaga yang bisa menjadi transportasi alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat desa namun terdapat mobil layanan kesehatan dari

pihak-pihak swasta dan beberapa desa yang sudah memiliki *ambulance* desa. Banyaknya layanan yang ditawarkan oleh pemerintah atau pihak swasta dapat menciptakan persaingan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat lebih memilih pelayanan yang terbaik dalam pemenuhan kebutuhannya, sebagai contoh di Desa Ngadiluhur, masyarakat lebih sering menggunakan mobil *ambulance* desa dibandingkan dengan mobil siaga, namun ada beberapa juga yang lebih memilih menggunakan mobil siaga.

4. Pemerintahan yang Digerakkan oleh Misi

Sejalan dengan visi Kabupaten Bojonegoro pada naskah RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 yaitu; "Menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing". Pemerintah kabupaten melalui pengadaan bantuan mobil siaga kepada desa berupaya untuk mewujudkan visi yang telah ditargetkan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam meningkatkan pelayanan. Mobil siaga menjadi salah satu wujud pemerintah dalam melayani kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat terkait dengan penyediaan sarana transportasi.

Dalam prinsip pemerintahan yang digerakkan oleh misi, upaya pemerintah untuk meningkatkan inovasi pelayanan terus digerakkan mengingat kebutuhan masyarakat semakin lama semakin bertambah. Sehingga peningkatan dalam pemberian layanan publik harus terus dievaluasi dan dikembangkan menjadi layanan yang tepat guna dan berkualitas untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

5. Pemerintahan Berorientasi Hasil

Pemerintah berorientasi hasil yaitu pemerintahan yang lebih mementingkan hasil kinerja daripada faktor input (Fatikha, 2016). Orientasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu dengan menyediakan layanan transportasi mobil siaga desa yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan. Penyediaan fasilitas sosial tersebut tentunya berdasarkan kebutuhan masyarakat yang semulanya berawal dari adanya aduan masyarakat terkait dengan sulitnya mendapat transportasi untuk menuju ke rumah sakit karena domisili yang jauh dari kota dan kondisi sosial yang kurang mampu.

Setelah adanya aduan dari masyarakat tersebut, pemerintah mulai mempertimbangkan dari segi efektivitas dan pendanaan karena membutuhkan dana yang cukup besar. Pada tahun 2022, akhirnya pemerintah mulai memberikan bantuan mobil siaga kepada desa yang sudah memenuhi persyaratan secara regulasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial bahwa;

"Apapun programnya, tentunya pemerintah akan terus melakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik bagi masyarakat" (Hasil wawancara 21 November 2023).

6. Pemerintahan Berorientasi Masyarakat

Prinsip ini sejalan dengan peran pemerintah yaitu sebagai pemberi layanan kepada masyarakat, yang mana pemerintah dalam hal ini diharuskan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya dan memberikan pelayanan optimal. Menurut data yang didapatkan, program mobil siaga dinyatakan sudah sesuai dengan harapan masyarakat mengenai kemudahan sarana transportasi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan mengatasi situasi gawat darurat yang terjadi di masyarakat. Upaya pemerintah dinilai cukup baik dalam hal mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dengan menyediakan layanan mobil siaga desa. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial bahwa;

"Memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah, oleh karenanya pemerintah akan melakukan upaya sebaik mungkin dalam melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat" (Hasil wawancara 21 November 2023).

7. Pemerintahan Wirausaha

Pada dasarnya, wirausaha dalam pemerintahan yang dimaksud dalam prinsip ini tentunya berbeda dengan tujuan perusahaan atau swasta, yakni dalam memberikan layanan kepada masyarakat pemerintah akan memperoleh kepuasan dari pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat sejalan dengan fungsi pemerintah. Peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik ditunjukkan dalam pemberian layanan mobil siaga kepada desa untuk sarana transportasi bagi yang membutuhkan. Namun, sejauh ini masih terdapat beberapa kendala yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab pengelolaan mobil siaga desa.

8. Pemerintahan Antisipatif

Pemerintahan antisipatif yakni mengurangi terjadinya masalah yang lebih kompleks dengan cara mencegah atau mengantisipasi (Fatikha, 2016). Pelaksanaan prinsip pemerintahan antisipatif dalam konsep *reinventing government* di Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pelayanan mobil siaga tergolong cukup baik. Dalam hal ini, antisipasi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menyediakan layanan mobil siaga desa yang dipergunakan secara gratis.

9. Pemerintahan Desentralisasi

Pemerintahan desentralisasi adalah pengubahan kinerja dari hierarkis menjadi kerja sama tim yang bertujuan menghasilkan inovasi kinerja yang lebih baik. Pada pelaksanaan mobil siaga, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan pemerintah desa dalam pelayanan mobil siaga demi mewujudkan peran pemerintah sebagai penyedia layanan bagi masyarakat. Dalam hal ini, ada baiknya jika masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan mobil siaga dengan memberikan dukungan kepada pemerintah dan menggunakan mobil siaga sesuai dengan kebutuhan. Dibutuhkannya kerja sama ini adalah untuk mendukung terciptanya kesejahteraan daerah melalui kepuasan masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang sejalan dengan konsep *reinventing government*.

10. Pemerintahan yang Berorientasi Pasar

Dalam hal ini pemerintah diharuskan mendorong perubahan dan memiliki strategi yang inovatif sehingga masyarakat sebagai penerima layanan akan merasakan manfaat pelayanan yang baik dan modern. Pada tahun 2019 sebelum diberikannya bantuan mobil siaga, pemerintah sudah melakukan promosi pasar dengan cara sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dan kegunaan mobil siaga. Sosialisasi ini dilakukan dengan target seluruh masyarakat Bojonegoro terutama masyarakat daerah pelosok melalui perangkat desa yang bertugas sebagai pengelola mobil siaga desa. Untuk pengelola mobil siaga, pemerintah menetapkan tim khusus yang menjadi penanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan mobil siaga yaitu dengan menetapkan ketua pelaksana juga supir yang siap siaga untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

Pemberian layanan Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro digolongkan baik dalam hal ketepatan dan antisipasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Bojonegoro dengan memberikan bantuan mobil siaga desa yang dapat digunakan masyarakat sebagai transportasi kesehatan dan kegawat-daruratan yang dapat terjadi. Namun dalam layanan mobil siaga ini masih terdapat kekurangan yaitu terkadang tidak tersedianya supir menjadikan hambatan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan mobil siaga. Penerapan prinsip *reinventing government* belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga dampak yang dihasilkan belum begitu terlihat.

Saran

Masih terdapat beberapa indikator pelaksanaan yang belum terpenuhi dalam layanan mobil siaga jika mengacu pada prinsip *reinventing government* yakni pada indikator pemerintahan kompetitif, yang mana pemerintah belum sepenuhnya kompetitif dalam pemberian layanan mobil siaga desa, dibuktikan dengan masyarakat yang lebih sering menggunakan layanan *ambulance* desa dan mengakibatkan mobil siaga desa kurang diminati dibandingkan *ambulance* desa. Menghadapi hal tersebut, direkomendasikan agar pemerintah melakukan perbaikan pelayanan mobil siaga yang dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi lanjutan terkait pemanfaatan mobil siaga desa kepada masyarakat awam yang mungkin belum mengetahui terkait penggunaan mobil siaga.

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain; keterbatasan referensi mengenai teori dalam penelitian serta kurangnya informan dalam upaya pengumpulan data. Sehingga disarankan bagi penelitian selanjutnya agar mengadopsi teori atau konsep lain dalam menganalisis pemberian dan dampak layanan kepada masyarakat dan memperluas daerah penelitian sehingga berpotensi mendapatkan lebih banyak informan.

Daftar Pustaka

Amalia, N. V., Priyanti, R. P., & Nahariyani, P. (2018). Efektivitas Penggunaan Ambulance Siaga Desa dalam Transportasi Pre Hospital. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 4(1), 52–63. <https://doi.org/10.33023/jikep.v4i1.13>

- Amiruddin. (2016). *Reinventing Government*. Retrieved January 6, 2024, from <https://osf.io/preprints/osf/6an4h>
- Apriyanto, S. D., Fitriaty, F., & Indrawijaya, S. (2023). Model Reinventing Government Menuju Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 1246. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1115>
- DIY, B. (2015). *Reinventing Government (Mewirusahaakan Birokrasi)*. <https://bkj.jogjaprovo.go.id/informasi-publik/artikel/reinventing-government-mewirusahaakan-birokrasi-how-the-entrepreneurial-spirit-is-transforming-the-public-sector>
- Djumiarti, T. (2010). Menggagas Strategi Reinventing Government dalam Memantapkan Kehidupan Berbangsa. *Forum*, 01–12. Retrieved January 6, 2024, from <http://eprints.undip.ac.id/19403/>
- Fatikha, A. C. (2016). Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(1), 90–97. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/78>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>. (n.d.)
- <https://bojonegorokab.go.id/berita/7116/mobil-siaga-desa-di-bojonegoro-beri-manfaat-langsung-ke-masyarakat>. (n.d.)
- Kemdagri, B. P. P. (2018). *Mewirusahaakan Birokrasi (Reinventing Government): Mentransformasi Semangat Wirausaha kedalam Sektor Publik*. https://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=965
- Madjid, L. (2017). Optimalisasi Pelayanan Publik Perspektif David Osborne. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(2), 130–140. <https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/administrasita/article/download/166/133>
- Murtir Jeddawi. (2008). Membangun Organisasi Birokrasi yang Katalis (Telaah Kritis Model Birokrasi Indonesia), *Unisia; Journal of Science and Humanities*, 31(68), 1-14, <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/146>
- Mustanir Ahmad. (2019). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif. Retrieved January 6, 2024, from

<http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/pwb2g>

Ramadhani, Mita, F., Pikri, F., & Wahidah, I. (2022). Penerapan Aspek Pemerintahan Milik Rakyat dan Pemerintahan Mengacu pada Pasar Dalam Konsep Reinventing Government di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2395–2409. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/1431>

Sari Sasi Gendro, Dea Aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).

Wiseno, B., Susetiyanto, A. D., Ikhwan, K. M., & Suryono. (2023). Keberadaan Mobil Siaga Desa di Masyarakat di Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmiah Pemenang-JIP*, 5(2)9–15. <https://jurnal.stikespamenang.ac.id/index.php/jip/article/view/170>